

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PADANG DALAM SOSIALISASI PEMILU
LEGISLATIF 2009 DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



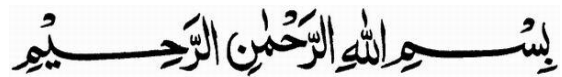
Oleh :

**DONI PUTRA
65040/ 2005**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan seagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan kewarganegaraan di Jurusan Ilmu Sosial, Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dengan judul :

“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG DALAM SOSIALISASI PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA PADANG”

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang akan menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Politik, Ibu Dra. Henni Muchtar selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H. M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak DR. H. Dasril, M.Ag, Bapak Drs. H. Akmal, S.H. M.Si dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dan seluruh staf karyawan/karyawati jurusan ilmu sosial politik.
6. Bapak dan Ibu kantor KPU Kota Padang yang sangat banyak membantu dalam memberikan data-data untuk penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Zubir dan Ibunda tercinta Nurtini yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini bagi penulis, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayang dan nasehat-nasehat yang sangat berarti dari apapun juga, dukungan baik moril maupun materil dan perhatian serta

kerelaannya dengan seikhlas-ikhlasnya untuk membimbing penulis hingga dapat menempuh sarjana pendidikan kewarganegaraan ini.

8. Seluruh keluarga besar saya, yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat bagi saya untuk selalu menjadi lebih baik serta sukses dalam menempuh hidup dan kehidupan ini.
9. Teman-teman angkatan 2005 Pendidikan Kewarganegaraan dan seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Juni 2012

Penulis

Doni Putra

ABSTRAK

DONI PUTRA : TM/NIM / 2005/ 65040 PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILU LEGISLATIF 2009

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dinilai kurang berhasil dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2004. Karena perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 lebih rendah dan tingkat surat suara tidaksah lebih tinggi dibandingkan pemilu tahun 2004. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009, seperti cara penandaan suarat suara pada pemilu tahun 2004 mencoblos sedangkan pada pemilu legislatif 2009 mencontreng, dan surat suara yang harus ditandai oleh pemilih sebanyak 4 surat suara (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan DPD), serta peeserta pemilu diikuti oleh 38 partai politik. Jika tidak disosialisasikan sejak dini dan intensif maka akan menimbulkan keraguan bagi pemilih dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatandeskriptif. Informan penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumenter berupa memo, pengumuman, instruksi, peraturan dan lain-lain. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, interprestasi data dan pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh selama ini.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan KPU Kota Padang dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif 2009 dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mekanisme sosialisas secara langsung dengan metode tatap muka dengan mandatangi langsung sasaran sosialisasi pemilu legislatif 2009. Dan dengan mekanisme sosialisasi pemilu secara tidak langsung dengan metode alat bantu yaitu melalui media elektronik, media massa, dan media cetak terbatas. Selanjutnya yang menjadi hambatan KPU Kota Padang dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu legislative 2009 meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya adalah permasalahan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di KPU kota Padang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penjadwalan kegiatan sosialisasi yang berbenturan dengan kegiatan KPU lainnya, dan jadwal kegiatan sosialisasi yang berbenturan dengan jadwal ujian siswa/siswi SLTA dikota Padang, serat sarana dan prasaran pendukung yang kurang memadai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	10
1. Pengertian Peranan	10
2. Sosialisasi Politik.....	12
a. Pengertian Sosialisasi Politik	12
b. Tujuan Sosialisasi	17
c. Mekanisme Sosialisasi.....	20
d. Media Sosialisasi	23
e. Sarana Sosialisasi	25
f. Sasaran Sosialisasi	27
g. Kendala-kendala Sosialisasi	28
a) Faktor Internal	29
b) Faktor Eksternal.....	30
3. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2009.....	30
B. Kerangka Konseptual	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
E. Teknik Keabsahan Data	39
F. Analisa Data	40

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
a. Geografis Kota Padang	41
b. Keadaan Penduduk	42
2. Jumlah Pemilih Kota Padang	43
3. Deskripsi KPU Kota Padang	44
B. Temuan Khusus	48
1. Peranan KPU Kota Padang Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	48
1) Program Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 Oleh KPU Kota Padang	49
2) Menentukan Tujuan, Materi, Target dan Sasaran, Serta Mekanisme Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 ..	54
a) Tujuan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	55
b) Materi Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	57
c) Target dan Sasaran Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	59
d) Mekanisme Dan Metode Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	63
1. Mekanisme Sosialisasi Secara Langsung Dengan Metode Tatap Muka	66
2. Mekanisme Sosialisasi Secara Tidak Langsung Dengan Metode Alat Bantu	71
3. Media Kerjasama Dengan Lembaga/ Instansi	82

4. Kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang Dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	88
1) Faktor Internal	88
a. Permasalahan Anggaran	88
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Ada Di KPU Kota Padang	89
2) Faktor Eksternal.....	90
C. Pembahasan	92
1. Peranan KPU Kota Padang Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	92
1) Program Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	92
2) Tujuan, Materi, Target dan Sasaran, Serta Mekanisme Dan Metode Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	95
a) Tujuan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	95
b) Materi Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	98
c) Target dan Sasaran Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	98
d) Mekanisme dan metode Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	101
a) Mekanisme Sosialisasi Secara Langsung Dengan Metode Tatap Muka	102
b) Mekanisme Sosialisasi Secara Tidak Langsung Dengan Metode Alat Bantu	103
2. Kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	106
1) Faktor Internal	106
a) Permasalahan Anggaran	106
b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Ada Di KPU Kota Padang	107
2) Faktor Eksternal.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
C. Keterbatasan Penelitian	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara Nasional Pada Pemilu 2004 dan Pemilu Legislatif 2009	3
Tabel 1.2. Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	8
Tabel 3.1. Nama-Nama Anggota KPU Kota Padang	37
Tabel 4.1. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Padang	46
Tabel 4.2. Kelompok Kerja Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009	53
Tabel 4.3. Metode Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009	64

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1. Mekanisme Sosialisasi	23
Skema 2.1. Kerangka Konseptual	34
Gamabar 4.1. Peta Kota Padang	44
Skema 4.1.Struktur Organisasi KPU Kota Padang	46
Skema 4.2. Unsur Sosialisasi Politik KPU Kota Padang	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto-foto Mekanisme Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 Oleh KPU

Kota Padang

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang demokratis salah satunya di tandai dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil-wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan seperti DPR, DPD dan DPRD sampai kepada kepala desa.

Pelaksanaan pemilu dianggap sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi, karena pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa memenuhi syarat menurut undang-undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik, maka dibentuklah suatu lembaga indenpenden yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilihan calon presiden dan calon wakil

presiden. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilu pasal 1 ayat (6) bahwa “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Dalam peraturan KPU No. 23 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD menjelaskan bahwa, suatu pemilu ada berbagai tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu. Adapun tahapan materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdiri dari pemutakhiran data pemilih antara lain, persiapan dan pendaftaran parpol peserta pemilu, pendaftaran dan penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan, hak dan kewajiban warga negara pasca Pemilu.

Pemilu legislatif tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan dilaksanakan dengan sistem baru. Partai-partai politik besaing untuk mendapatkan kursi diparlemen. Perubahan sistem pemilu yang sangat kompleks itu salah satunya menyagkut cara pemberian suara. Pada pemilu kali ini cara pemberian suara tidak lagi dilaksanakan dengan cara mencoblos, tetapi dengan cara mencontreng. Perubahan tersebut dipicu oleh disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang cara pemberian suara yang baru. Perubahan cara pemberian

suara yang mencontreng ini dinilai memiliki potensi masalah yang sangat besar.

Seperti diketahui dalam data KPU jumlah suara sah pada pemilu 2009 hanya mencapai 104.099.785suara. Sebagai perbandingan, pada pemilu tahun 2004 jumlah suara yang sah lebih banyak ketimbang suara sah pada pemilu tahun 2009. Hal ini terlihat jika kita membandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu. Jumlah pemilih yang ikut memilih pada pemilu legislatif 2009 adalah 121.588.366 orang. Sedangkan pemilih yang ikut memilih pada pemilu legislatif 2004 yang lalu adalah sebanyak 124.420.339 orang.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara Nasional
Pada Pemilu 2004 Dengan Pemilu Legislatif 2009

Keterangan	Pemilu Legislatif Tahun 2004	Pemilu Legislatif tahun 2009
jumlah pemilih yang terdaftar	148.000.369 orang	171.265.441 orang
Jumlah yang memilih	124.420.339 orang	121.588.366 orang
Jumlah tidak memilih	23.380.030 orang	49.677.075 orang
Jumlah suara sah	113.462.414 suara	104.099.785 suara
Jumlah suara tidak sah	10.957.525 suara	17.488.581 suara

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Padang tahun 2009

Salah satu penyebab rendahnya perolehan suara dan menurunnya jumlah suara sah pada pemilu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang intensif dari KPU selaku lembaga utama penyelenggara pemilu. Hal ini menyebabkan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih kurang paham terhadap cara memilih dibalik suara. Akibatnya terjadi kerusakan suara yang cukup tinggi dan rendahnya minat untuk memilih dikarenakan kurangnya pemahaman

pemilih terhadap sistem dan aturan pemilu. (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, 2008: 53)

Sosialisasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Sosialisasi menjadi penting karena dapat memperkenalkan sistem politik pada seseorang sehingga orang tersebut dapat menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. (Michael Rush dan phillip Altoff, 2005:25)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 pasal 8 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bertugas melaksanakan sosialisasi pemilu dan yang berkaitan dengan tugas beserta wewenang KPU kepada masyarakat. KPU juga harus bekerja keras agar para pemilih memiliki cukup informasi mengenai pemilu. KPU harus melakukan sosialisasi yang maksimal dan efektif supaya bisa menarik minat pemilih agar ikut dalam proses pemberian suara pada pemilu.

Dalam melaksanakan proses sosialisasi penyelenggaraan pemilu tersebut KPU pusat harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara pemberian suara yang telah diperbaharui, daftar pemilih tetap, jumlah peserta pemilu ataupun informasi penting lain yang bersifat penting. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu ditingkat Kota.

Maka dari itu perlu disosialisasikan secara dini arti penting pendidikan politik bagi pemilih (*voter education*). Hal ini diperlukan untuk membangun kesadaran pentingnya menjadi pemilih dan partisipasi politik. Oleh karena itu tidak heran jika banyak pendapat yang menyatakan bahwa kinerja KPU 2004 lebih baik dibandingkan kinerja KPU 2009. Kinerja KPU saat ini dinilai sangat lamban dalam melakukan sosialisasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyadaran politik kepada pemilih. Namun harus dipahami mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu tidak selamanya dilakukan menjelang hari H saja. (Agung, 2009:2).

Agar mencapai tujuan yang diharapkan, pelaksanaan sosialisasi pemilu terhadap pemilih perlu dilakukan dengan cara yang cerdas, menarik, dan kreatif. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU telah membuat rencana yang disebut dengan KFC, yaitu *knowledge, featuring of process, and conforming*. *Knowledge* adalah memberitahukan tentang pemilu, *featuring of process* adalah melibatkan mereka dalam proses pemilu, dan *conforming* adalah membuat pemilih pemula tidak asing dengan pemilu. Oleh karena itu sosialisasi pemilu terhadap pemilih perlu dilaksanakan oleh KPU. (Hervin Saputra dan Nina Suartika, 2008).

Poin-poin penting yang harus disosialisasikan menurut Hafiz adalah tata cara penandaan surat suara, kapan hari dan tanggal pemilihan, dan pendidikan pemilih mengenai pentingnya Pemilu sebagai sarana efektif untuk

kemajuan bangsa. Mengenai penandaan, sosialisasi tetap satu kali (pada nama calon), namun apabila ditemukan penandaan lebih dari satu kali (menandai calon dan partai politiknya) dianggap sah.(Agung, 2009:4).

Mengenai tata cara penandaan, sosialisasinya adalah mencentang, mencontreng (√) atau sebutan lainnya. Namun, jika ditemukan bentuk pemberian tanda lain pada surat suara, seperti tercoblos, tanda silang (x), tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suara tetap dianggap sah. Disamping itu Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 ada sebanyak 4 surat suara yang harus dicontreng yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Pendidikan Pemilih bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami teknis Pemilu, tetapi juga hal substantif dari Pemilu.(Agung SS. Raharjo, 2009:5).

Dalam data KPU Sumbar tahun 2009 diperoleh bahwa adanya kecenderungan rendahnya perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan daerah perkotaan yang menjadi pusat ibukota dan pusat pemerintahan Sumatera Barat, tetapi Kota Padang justru menjadi daerah perkotaan dengan perolehan suara terendah. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Dikota Padang pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 hanya memperoleh suara 63 persen dari 548.014 pemilih.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “*Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Dalam Sosialisasi Pemilu legislatif 2009 Di Kota Padang*”

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dinilai kurang berhasil dibandingkan Pemilu tahun 2004.
2. Rendahnya partisipasi pemilih dan banyaknya surat suara yang rusak serta surat suara tidak sah pada pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dikota Padang.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 sehingga meragukan pemilih.
4. Adanya pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang.
5. Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 yang di lakukan KPU kota Padang dinilai belum terealisasi secara maksimal.
6. Adanya kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis meembatasi maslaha sebagai berikut :

1. Peranan KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalame nsosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi KPU kota Padang dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskanbagaimana peranan KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota Padang.Penulis memfokuskan didaerah kota padang karena rendahnya partisipasi dan perolehan suara serta adanya kesalahan-kesalahan dalam pengambilan suara sehingga banyak surat suara yang rusak dan tidak sah pada pemilu legislatif 2009 di kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peranan KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 dikota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pemilih agar cerdas dan bijaksanan dalam menentukan pilihannya pada setiap pemilu,
2. Secara praktis, sebagai masukan bagi KPU khususnya KPU kota Padang dalam menyampaikan informasi tentang pemilu serta mensukseskan sosialisasi pemilu terhadap masyarakat umum.
3. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian dan kajian lebih lanjut, yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program sosialisasi pemilu legislatif 2009 yang dilakukan KPU Kota Padang dijalankan dengan dua bentuk program, yaitu komunikasi secara langsung (tatap muka), secara tidak langsung berupa perantara media massa baik media elektronik maupun media cetak. Proses sosialisasi bersifat langsung atau dengan metode tatap muka dilaksanakan dengan mendatangi langsung kelompok sasaran sosialisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sosialisasi tatap muka ini dihadiri oleh nara sumber dari KPU Kota Padang dan perwakilan dari lembaga atau kelompok yang menaungi sasaran sosialisasi. Materi yang diberikan adalah berupa bahan *slide showpower point* dan ditayangkan melalui alat *infocus*. Peserta sosialisasi juga diberikan foto copy bahan sosialisasi tersebut. Setelah narasumber memberikan penjelasan materi sosialisasi pemilu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi terakhir juga dilengkapi dengan sesi simulasi tata cara pemberian suara yang dapat menggambarkan sejauh mana pemahaman peserta sosialisasi mengenai cara mencontreng. Simulasi ini mananggunakan sampel/contoh kertas suara dan melibatkan peserta sosialisasi bagaimana melakukan mencontreng yang benar.

Sosialisasi bersifat tidak langsung yang dilakukan KPU Kota Padang adalah melalui alat bantu seperti media massa di kota Padang dan media seperti poster, stiker, baliho serta spanduk. Media massa yang digunakan

KPU Kota Padang adalah media cetak dan elektronik seperti radio Classy FM dan stasiun televisi lokal Padang TV. KPU Kota Padang juga memanfaatkan media cetak kota Padang yaitu Harian Pos Metro, Padang Ekspres, Haluan dan Singgalang.

Agar sosialisasi informasi pemilu legislatif tahun 2009 lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka KPU Kota Padang mencetak beberapa alat bantu cetak terbatas seperti baliho, spanduk, poster maupun stiker yang dipajang di tempat-tempat umum di Kota Padang.

Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Padang dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif 2009 di kota Padang adalah, dari faktor internal berupa keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusianya.

Sedangkan dari faktor eksternalnya berupa, penjadwalan kegiatan sosialisasi yang berbenturan dengan dengan kegiatan KPU lainnya yang berhubungan dengan bidang teknis maupun logistik seras kampanye. Kondisi ini membuat masing-masing Koorwil terkendala untuk membantu Koordiv Sosialisasi untuk melaksanakan sosialisasi yang berlokasi di wilayah kerjanya. Serta, konfirmasi jadwal kegiatan dengan pihak penanggung jawab tempat, terutama pada kasus sosialisasi di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan oleh kapasitas ruangan yang kurang mencukupi, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai sampai pada jadwal sosialisasi pemilu legislatif 2009 di kota Padang yang berbenturan dengan jadwal ujian siswa/siswi SLTA di Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain :

Dalam mensosialisasikan pemilu legislatif 2009 KPU Kota Padang membuat semacam perencanaan sosialisasi baik itu dengan KPU pusat maupun KPU tingkat Provinsi. Hal ini dilakukan agar program-program sosialisasi pemilu legislatif 2009 berjalan dengan efektif.

Setelah penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 KPU Kota Padang mengadakan evaluasi terhadap kinerja program yang telah dilaksanakan, untuk mengukur seberapa besar keberhasilan program tersebut. Serta mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program seperti foto, video dan daftar presensi kehadiran, untuk dapat digunakan sebagai bahan pengukur evaluasi keberhasilan program.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif 2009 dikota Padang oleh KPU Kota Padang, bukan pada isi sosialisasi tersebut, ini dilihat bagaimana program dan mekanisme serta metode sosialisasi yang dipergunakan oleh KPU kota.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Al, Rafni. 2003. *Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang*. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Burhan, Bungin. 2001. *Erotika media massa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hafied, Changara. 2009. *Komunikasi Politik. Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariyanto.1992. *Partai Politik dan Pemilihan Umum*. Jakarta: Gramedia.
- M. Fachri Adnan. 1996. *SistemPolitik Indonesia*. Padang: Proyek UNP.
- Meriam, Budiardjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mohtar, Masoed dan Colin Mac Andrew. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ruchajat Harun dan Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rush, Michael dan Philip Altoff. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bandung:Grafindo
- Soejono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiyono. 2009. *Metodeb Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta